

KATALOG : 4102004.3502

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
KABUPATEN PONOROGO
2019**

<https://ponorogokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO**

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
KABUPATEN PONOROGO
2019**



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PONOROGO 2019

Katalog BPS : 4102004.3502

No Publikasi : 35020.1927

Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : vi + 82

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Diterbitkan oleh :

@Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Dicetak oleh :

CV. Azka Putra Pratama

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum :

Ir. Siswi Harini, M.Si.

Penyunting :

Tatik Khoiriyah, S.ST.

Penulis :

Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

Pengolah Data :

Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

Gambar Kulit :

Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo 2019” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, dan hasil Sensus Penduduk.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial lainnya.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Ponorogo, Desember 2019
BPS Kabupaten Ponorogo
Kepala

Siswi Harini

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
1. Kependudukan.....	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis kelamin...	4
1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk	6
1.3 Angka Beban Ketergantungan	8
1.4 Penggunaan Alat/Cara KB	10
2. Kesehatan	13
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	16
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	19
3. Pendidikan	23
3.1 Angka Buta Huruf	26
3.2 Rata-rata Lama Sekolah	27
3.3 Tingkat Pendidikan	28
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	30
3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan	32
4. Ketenagakerjaan	37
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	40
4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	42
4.3 Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan	44
4.4 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	45
4.5. Upah/ Gaji/ Pendapatan Bersih	47

5.	Taraf dan Pola Konsumsi	51
	5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	53
6.	Perumahan dan Lingkungan	57
	6.1 Kualitas Rumah Tangga	60
	6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	62
	6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal	62
7.	Kemiskinan	65
	7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo	68
	7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	69
8.	Sosial Lainnya	73
	8.1 Teknologi Informasi dan Komunikasi	75
	8.2 Kredit Usaha	77
	8.3 Jaminan Sosial dan Pembiayaan/Asuransi	79
	8.4 Kepemilikan Aset	80



KEPENDUDUKAN

<https://portal.bps.go.id>



1. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah adalah jumlah penduduk yang besar. Pada tahun 2018, dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo menduduki peringkat dua puluh tiga jumlah penduduk terbanyak. Sementara jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur adalah Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 tercatat sebanyak 870,70 ribu jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar delapan ratus jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 yang mencapai 869,89 ribu jiwa. Sementara bila dibandingkan dengan delapan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo saat ini mengalami peningkatan sekitar 1,64 persen dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 856,68 ribu jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu delapan tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo telah mengalami penambahan penduduk sebesar 14,02 ribu jiwa.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
di Kabupaten Ponorogo, 2013-2018**

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)
2013	863,89	99,74
2014	865,81	99,85
2015	867,39	99,91
2016	868,81	99,95
2017	869,89	99,93
2018	870,70	99,92

Sumber: *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020*

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 tercatat sebesar 0,09 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo sebesar 0,24 persen dan terus mengalami penurunan ditahun-tahun selanjutnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan adanya keberhasilan.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ponorogo, 2013-2018 (Persen)



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018 sebesar 99,92. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan secara rata-rata ada sebanyak 100 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Ponorogo hampir seimbang dengan jumlah penduduk perempuannya. Kondisi dari tahun ke tahun sejak 2013 terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Ponorogo cenderung meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2016. Namun pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan rasio jenis kelamin walaupun tidak signifikan sehingga secara rata-rata penduduk laki-laki di Kabupaten

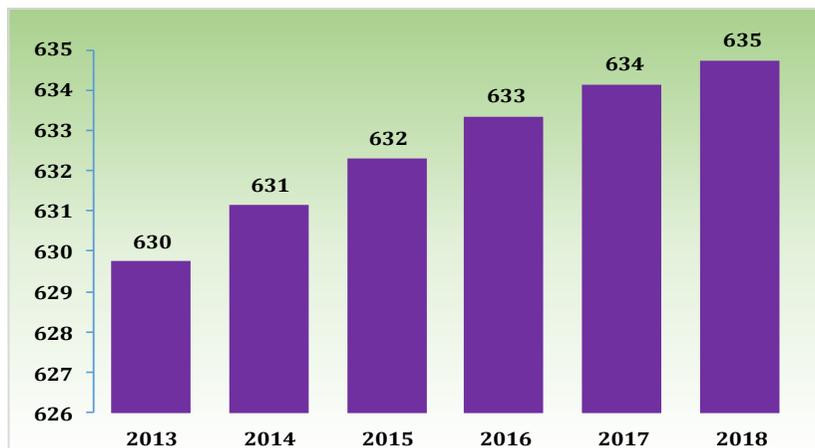
Ponorogo hampir seimbang dengan jumlah penduduk perempuan. Semakin berkembangnya lembaga pendidikan berbasis keagamaan khususnya pesantren berkelas nasional bahkan internasional yang mengkhususkan untuk mendidik santri laki-laki mengakibatkan arus migrasi masuk penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Ponorogo cukup seimbang.

Pada tingkat kecamatan di Kabupaten Ponorogo, wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ponorogo (77.888 orang) atau 8,95 persen dari total penduduk Kabupaten Ponorogo. Sementara wilayah yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Pudak dengan jumlah penduduk hanya 9.632 orang atau 1,11 persen dari total penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2018.

1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Kabupaten Ponorogo yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Ponorogo, 2013-2018 (Jiwa/km²)



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain masih ada yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai. Pada tahun 2013 kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo sekitar 630 jiwa per km², tahun 2014 meningkat menjadi sekitar 631 jiwa per km², selanjutnya pada tahun 2015 sekitar 632 jiwa per km², tahun 2016 sekitar 633 jiwa per km² serta tahun 2017 sekitar 634 jiwa per km². Sedangkan pada tahun 2018 kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo sekitar 635 jiwa per km².

Bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kabupaten/kota yang berada di eks Karesidenan Madiun pada tahun 2018 seluruhnya berada di bawah 1.000 jiwa per km² kecuali Kota Madiun yang mencapai 5.317 jiwa per km² sekaligus sebagai wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Selanjutnya diikuti Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun dengan masing-masing kepadatan penduduk sekitar 913 jiwa per km² dan 674 jiwa per km². Kemudian disusul Kabupaten Ngawi sekitar 641 jiwa per km², Kabupaten Ponorogo sekitar 635 jiwa per km² dan Kabupaten Pacitan sekitar 399 per km².

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Eks Karesidenan Madiun, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pacitan	554,39	1.389,87	399
Ponorogo	870,71	1.371,78	635
Madiun	681,39	1.010,86	674
Magetan	628,92	688,84	913
Ngawi	830,09	1.295,98	641
Kota Madiun	176,70	33,23	5317

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Bila dilihat dari kecamatan, di Kabupaten Ponorogo terjadi ketimpangan distribusi penduduk di wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada umumnya kepadatan penduduk yang tinggi berada di perkotaan. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ponorogo sekitar 3.491 jiwa per km², kedua adalah Kecamatan Babadan sekitar 1.522 jiwa per km². Selanjutnya disusul Kecamatan Jetis sekitar 1.289 jiwa per km², Kecamatan Siman sekitar 1.144 jiwa per km²., dan Kecamatan Kauman sekitar 1.056 jiwa per km². Adapun kecamatan yang kepadatannya di bawah 500 jiwa per km² yaitu Kecamatan Sampung, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pulung, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pudak.

1.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan

semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2013-2018 angka beban ketergantungan setiap tahun walaupun kurang signifikan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 angka beban ketergantungan di Kabupaten Ponorogo sebesar 47,05 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 penduduk usia tidak produktif. Besaran angka beban ketergantungan sebesar 47,05 persen terus berlanjut hingga tahun 2015. Sementara pada tahun 2016 dan 2017, angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 47,06 persen. Pada tahun 2018 angka beban ketergantungan naik menjadi 47,07 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 47 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Meningkatnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebagai dampak dari meningkatnya angka harapan hidup. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada sebanyak 10,95 persen penduduk yang berusia tua (65 tahun ke atas). Tahun 2014 proporsi penduduk usia tua meningkat lagi mencapai 10,96 persen. Hingga tahun 2015 dan 2016 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas terus naik menjadi 10,97 persen dan pada tahun 2017 menjadi 10,98. Pada tahun 2018 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas kembali naik menjadi 10,99 persen.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Ponorogo, 2013-2018 (Persen)

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	21,04	68,01	10,95	47,05
2014	21,04	68,00	10,96	47,05
2015	21,03	68,00	10,97	47,05
2016	21,03	68,00	10,97	47,06
2017	21,02	68,00	10,98	47,06
2018	21,02	67,99	10,99	47,07

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Pada Tabel 1.3 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk di Kabupaten Ponorogo masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 mencapai 68,01 persen pada tahun 2013 dan kemudian menurun pada tahun 2014-2017 menjadi sebesar 68,00 persen. Tahun 2018 kembali menurun menjadi 67,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Ponorogo menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) juga semakin menurun dari 21,04 persen pada tahun 2013-2014 menjadi 21,03 persen pada tahun 2015-2016 dan terus menurun menjadi 21,02 persen pada tahun 2017-2018.

1.4 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan melalui penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Keluarga Berencana selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat.

Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017-2018, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB mencapai di atas 50 persen yaitu masing masing sebesar 54,37 persen pada tahun 2017 dan 54,69 persen pada tahun 2018.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Ponorogo, 2017 dan 2018 (Persen)

Alat/Cara Kontrasepsi	2017	2018
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	10,61	4,55
MOP/Vasektomi	0,00	1,29
AKDR/IUD/Spiral	25,32	19,49
Suntikan	45,21	44,02
Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit	8,32	10,74
Pil	10,23	11,69
Kondom/Karet	0,00	3,88
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	0,00	0,00
Cara Tradisional	0,32	4,35
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	54,37	54,69

Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017 - 2018

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, alat kontrasepsi suntikan dan AKDR/IUD/Spiral yang paling banyak diminati di Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2017 penggunaan suntikan mencapai 45,21 persen dan sedikit menurun menjadi 44,02 persen pada tahun 2018. Begitu pula penggunaan AKDR/IUD/Spiral yang mengalami penurunan cukup tajam dari 25,32 persen pada tahun 2017 menjadi 19,49 persen pada tahun 2018.

Selain alat kontrasepsi suntikan dan AKDR/IUD/Spiral, beberapa alat kontrasepsi lain yang masih sering digunakan adalah Pil, Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit dan MOW/Tubektomi. Pada tahun 2017 penggunaan Pil mencapai 10,23 persen, kemudian meningkat menjadi 11,69 persen di tahun 2018. Sementara pemakaian Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit tahun 2017 sebesar 8,32 persen dan meningkat menjadi 10,74 persen pada tahun 2018. Penggunaan MOW/Tubektomi mengalami penurunan yang tergolong tinggi dari 10,61 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 4,55 persen pada tahun 2018. Penurunan persentase pemakai pada beberapa alat kontrasepsi kemungkinan disebabkan peserta KB mengganti/beralih ke jenis alat kontrasepsi lain yang dirasa lebih nyaman.

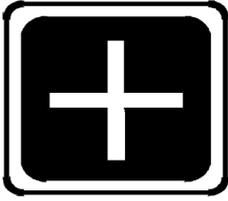
Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah kontrasepsi dengan cara MOP/Vasektomi, yang pada tahun 2018 persentasenya hanya mencapai 1,29 persen. Hal ini diduga karena masyarakat masih enggan dengan resiko alat kontrasepsi ini dimana penundaan kehamilan yang lebih bersifat permanen.



2

KESEHATAN

<https://pc.go.id>



2. KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang persalinannya dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga medis, serta persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tingkat kesehatan masyarakat antara lain usia harapan hidup dan angka kesakitan.

Masa kehamilan merupakan masa yang rawan kesehatan, baik kesehatan ibu yang mengandung maupun janin yang dikandungnya sehingga dalam masa kehamilan perlu dilakukan pemeriksaan secara teratur. Hal ini dilakukan guna menghindari gangguan sedini mungkin dari segala sesuatu yang membahayakan terhadap kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Setiap tahunnya diseluruh dunia diperkirakan 4 juta bayi meninggal pada tahun pertama kehidupannya dan dua pertiganya meninggal pada bulan pertama. Penyebab utama kematian pada minggu pertama kehidupan adalah komplikasi kehamilan dan persalinan seperti asfiksia, sepsis, dan komplikasi berat lahir rendah (Departemen Kesehatan RI, 2008).

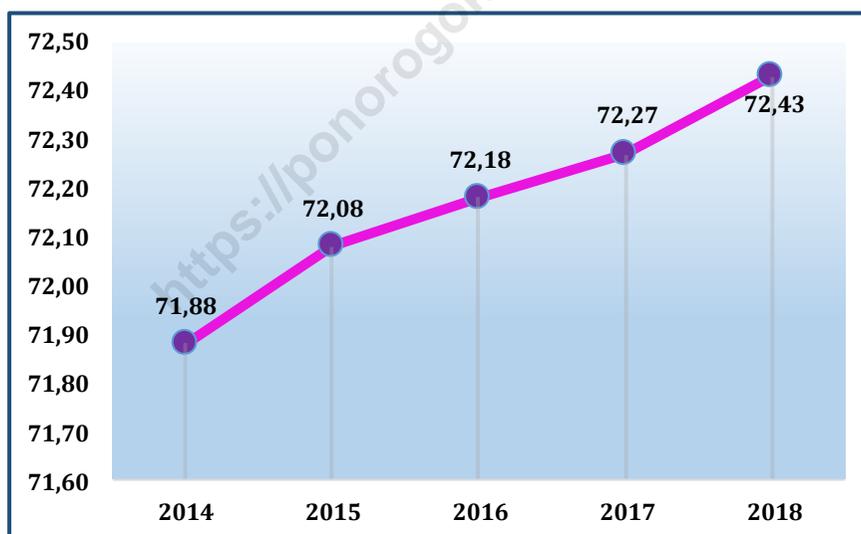
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya

Definisi Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Seath Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*.

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Penduduk di Kabupaten Ponorogo, 2014 - 2018 (Tahun)



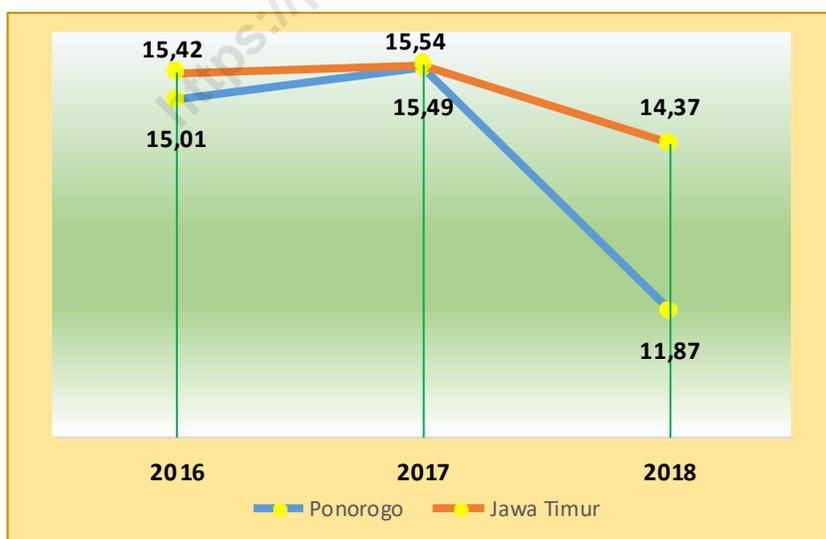
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2014-2018

Dari hasil penghitungan proyeksi yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun terakhir (2014 – 2018) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 71,88 pada tahun 2014 menjadi 72,43 pada tahun 2018.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Ponorogo mencapai 11,87 persen, mengalami penurunan sebesar 3,62 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 15,49 persen. Penurunan angka kesakitan yang cukup besar menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk pada tahun 2018 sudah semakin meningkat.

Gambar 2.2 Perbandingan Angka Kesakitan di Kabupaten Ponorogo dan Jawa Timur, 2016-2018 (Persen)



Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2018

Jika dibandingkan dengan angka kesakitan keseluruhan di Jawa Timur, selama tahun 2016 sampai tahun 2018, grafik menunjukkan bahwa angka kesakitan di Kabupaten Ponorogo lebih rendah dari Jawa Timur. Meskipun pada tahun 2017 angka kesakitan tidak terlalu berbeda jauh tetapi pada tahun 2018 angka kesakitan Kabupaten Ponorogo lebih rendah 2,50 persen dari Jawa Timur sebesar 14,37 persen.

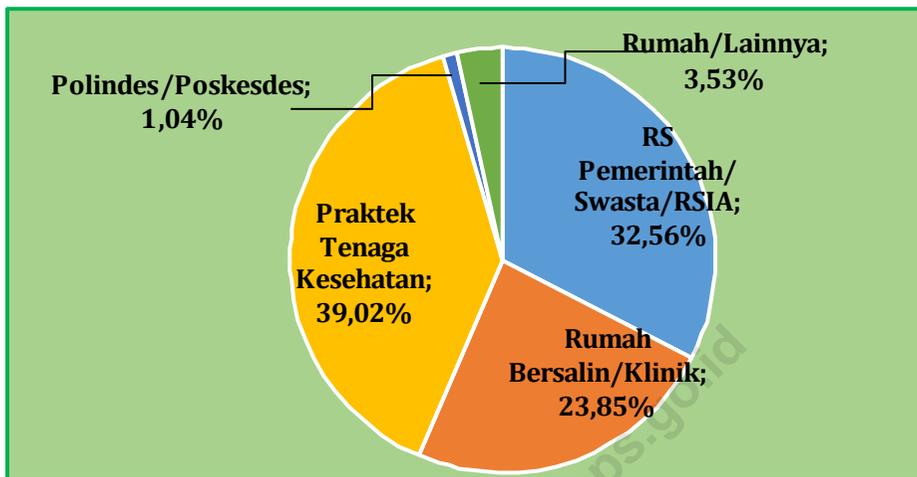
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan.

Pemilihan tempat persalinan yang tepat, menjadi salah satu bentuk kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi. Tingkat kesadaran masyarakat pada tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo sudah tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan sebelum dua tahun yang lalu di rumah sakit, rumah bersalin/klinik, dan praktek tenaga kesehatan sebesar 95,43 persen. Sebanyak 1,04 persen melahirkan di polindes/poskesdes, sedangkan yang melahirkan di rumah atau tempat lainnya hanya sekitar 3,53 persen.

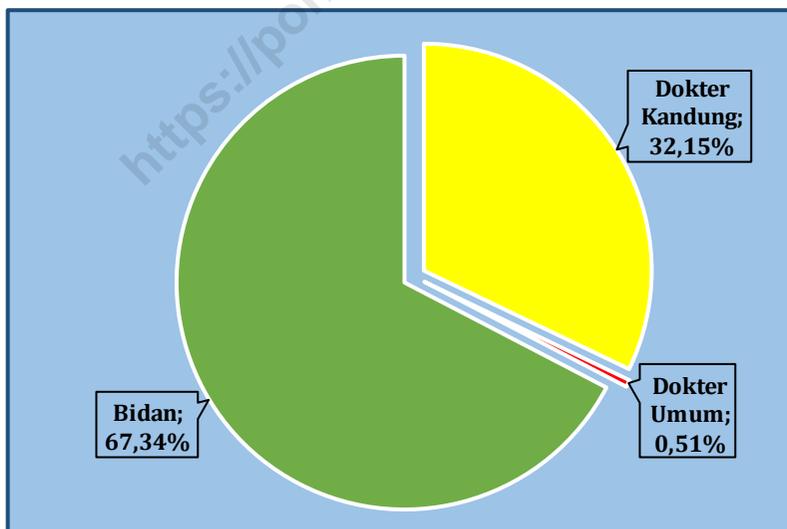
Persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu dokter atau bidan di Kabupaten Ponorogo telah mencapai 100 persen. Kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mempercayakan penanganan persalinannya kepada tenaga kesehatan. Penolong persalinan terbanyak dilakukan oleh bidan sebesar 67,34 persen. Lalu sebesar 32,15 persen dilakukan oleh dokter kandungan dan sisanya dilakukan oleh dokter umum.

Gambar 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Menurut Tempat Melahirkan Terakhir Sebelum Dua Tahun yang Lalu di Kabupaten Ponorogo, 2018



Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018

Gambar 2.4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15 - 49 Tahun Menurut Penolong Kelahiran Terakhir pada Anak Lahir Hidup Terakhir di Kabupaten Ponorogo, 2018



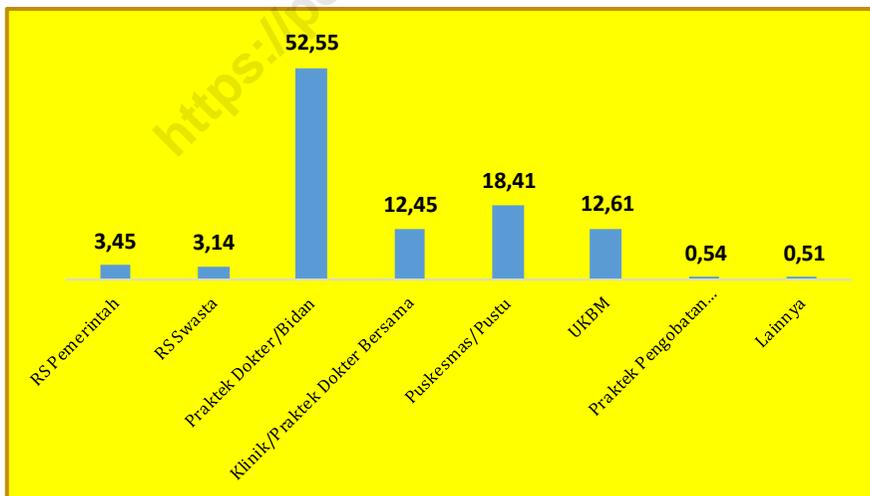
Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Masyarakat yang sebulan terakhir

mengalami keluhan kesehatan maupun gangguan sakit ada yang berobat jalan bahkan sampai rawat inap tetapi ada pula yang memilih untuk tidak berobat jalan. Pada tahun 2018, masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan maupun gangguan sakit yang memilih untuk berobat jalan sebesar 53,78 persen.

Masyarakat mayoritas memilih untuk ke praktek dokter/bidan untuk berobat jalan dengan persentase 52,55 persen. Pilihan kedua adalah ke puskesmas/pustu sebesar 18,41 persen. Hal ini dapat disebabkan karena pengobatan ke puskesmas yang digratiskan dan dekat dengan tempat tinggal. Rumah sakit belum menjadi pilihan utama karena kecenderungan seseorang berobat ke rumah sakit bila sakit yang dideritanya sudah cukup parah dan memerlukan penanganan khusus dengan fasilitas yang lengkap. Praktek pengobatan tradisional/alternatif dan lainnya menjadi pilihan terakhir untuk masyarakat berobat jalan.

Gambar 2.5 Persentase Penduduk Menurut Tempat Berobat Jalan yang Dikunjungi Selama Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Ponorogo, 2018 (Persen)



Catatan : UKBM meliputi poskesdes, polindes, posyandu dan balai pengobatan

Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018



3

PENDIDIKAN

<https://pc.go.id>



3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Memasuki tahun era tahun 1990-an, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja.

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kabupaten Ponorogo menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan akan difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan

tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan indikator tantangan di bidang pendidikan akan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan.

3.1 Angka Buta Huruf

Secara harfiah, angka buta huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia lima belas (15) tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana baik huruf latin atau arab, atau dapat membaca dan menulis huruf Braille. Semakin tinggi angka buta huruf menunjukkan semakin besar pula seharusnya upaya pemerintah dengan berbagai program dan kebijakan untuk memberantas buta huruf. Namun peran masyarakat dalam mendukung dan berpartisipasi untuk memberantas buta huruf sangat diperlukan guna mewujudkan masyarakat yang terbebas dari buta huruf.

Saat ini Kabupaten Ponorogo dikatakan belum terbebas dari buta huruf. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka buta huruf di Kabupaten Ponorogo tahun 2018 mencapai 10,15 persen. Lebih lanjut pembahasan secara gender, angka buta huruf penduduk perempuan di Kabupaten Ponorogo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Angka buta huruf penduduk perempuan tahun 2018 sebesar 13,74 persen, sedangkan angka buta huruf penduduk laki-laki sebesar 6,55 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, angka buta huruf di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan walaupun tidak terlalu signifikan. Secara keseluruhan, dari tahun 2017 ke tahun 2018 angka buta huruf menurun sebesar 0,78 persen. Angka buta huruf penduduk perempuan menurun sebesar 1,06 persen, lebih besar dibandingkan angka buta huruf laki-laki yang menurun sebesar 0,45 persen.

Angka buta huruf penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya fasilitas pendidikan, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor budaya

dan lainnya. Tingginya angka buta huruf ini menjadi tugas pemerintah sekaligus semua elemen masyarakat ke depan untuk saling bahu-membahu dalam usaha mengentaskan masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Ponorogo dari buta huruf.

Gambar 3.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Angka Buta Huruf di Kabupaten Ponorogo, 2018 (Persen)



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2018

3.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator tingkat pendidikan suatu masyarakat. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang harus dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Angka ini merupakan indikator yang diformulasikan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Angka rata-rata lama sekolah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program wajib belajar nasional.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Ponorogo tahun 2018 mencapai 7,17 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 7,17 tahun atau setara dengan kelas VII tingkat SMP. Tentunya capaian ini masih dibawah target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahunnya, bahkan capaian ini masih di bawah capaian Jawa Timur yang mencapai 7,39 tahun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2017, rata-rata lama sekolah Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dari 7,01 tahun pada 2017 menjadi 7,17 tahun pada 2018.

Gambar 3.2. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Ponorogo, 2013-2018 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

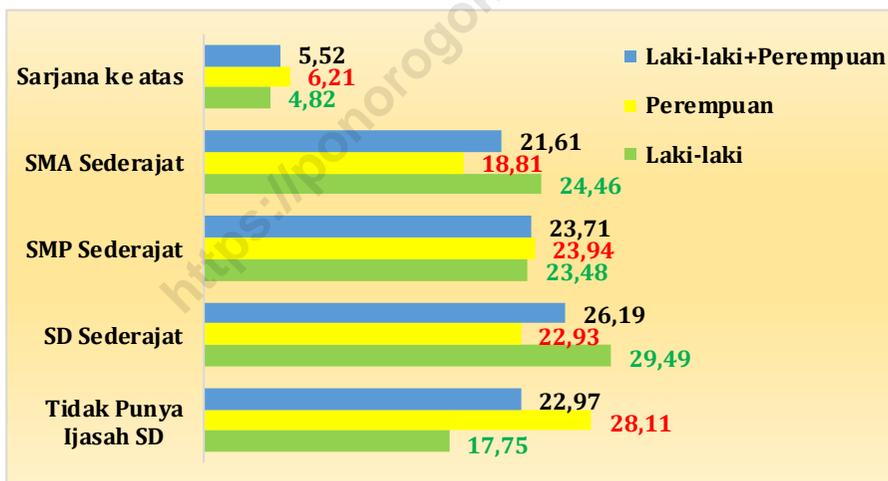
3.3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjadi salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Intelektual seseorang pada umumnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang. Demikian juga kemampuan interaksi sosial

seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan akan memperbesar kesempatan seseorang di pasar kerja nantinya. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Secara umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Ponorogo tidak begitu tinggi. Persentase penduduk Kabupaten Ponorogo usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 22,97 persen, tamat sekolah dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 26,19 persen dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 23,71 persen. Dengan demikian, sebanyak 72,87 persen penduduk Kabupaten Ponorogo usia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan SMP ke bawah.

Gambar 3.3. Persentase Penduduk Kabupaten Ponorogo Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Ponorogo, 2018



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas hanya 27,13 persen yang terdiri dari tamat SMA atau sederajat sebesar 21,61 persen, sedangkan tamat sarjana ke atas (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) sebesar 5,52 persen.

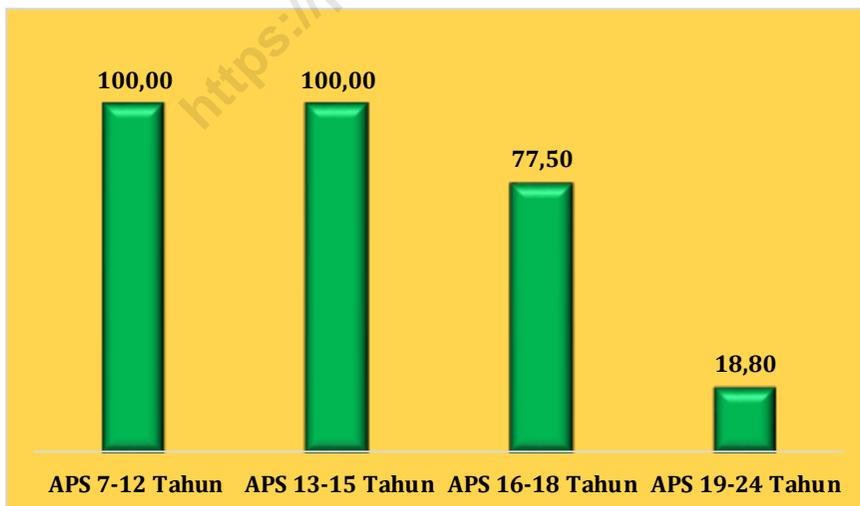
Yang menarik secara gender adalah persentase penduduk perempuan yang tidak tamat SD (28,11 persen) ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki (17,75 persen).

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Ponorogo, 2018 (Persen)



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018

Secara umum, APS Kabupaten Ponorogo per masing-masing kelompok usia sekolah ditunjukkan pada gambar 3.4. APS kelompok usia 7-12 tahun

Kabupaten Ponorogo tahun 2018 sebesar 100,00 yang berarti bahwa 100 persen penduduk Kabupaten Ponorogo usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa memandang tingkatan sekolahnya).

APS kelompok usia 13-15 tahun Kabupaten Ponorogo tahun 2018 sebesar 100,00 sama dengan APS kelompok usia 7-12 tahun. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Kabupaten Ponorogo pada usia 13-15 tahun 100 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun Kabupaten Ponorogo tahun 2018 sebesar 77,50 persen. Angka ini jauh lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 22 persen penduduk Kabupaten Ponorogo usia 16-18 tahun tidak memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Lebih lanjut, APS kelompok usia 19-24 tahun sebesar 18,80 persen dimana hal ini menunjukkan bahwa semakin besar usia seseorang, semakin kecil akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah.

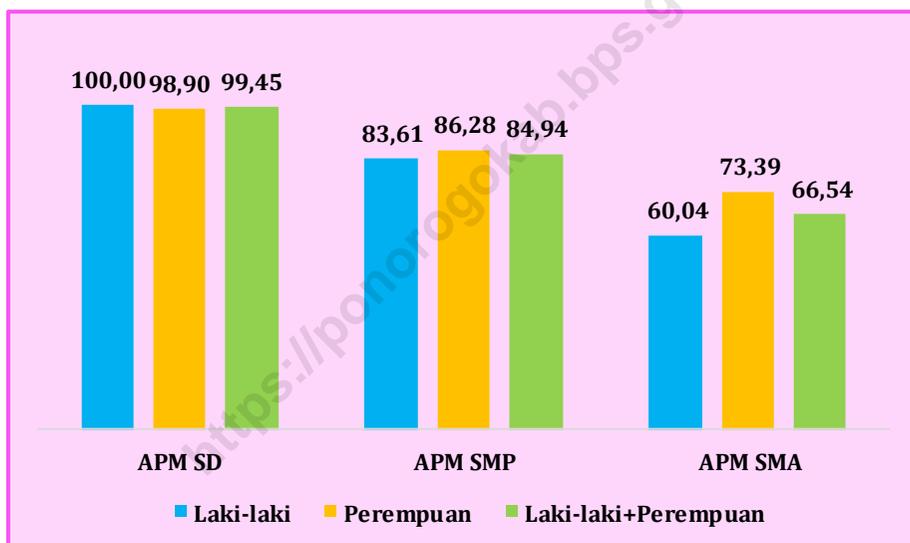
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa APS dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu dalam pendidikan formal. Namun, APS tidak dapat mengukur ketepatan jenjang pendidikan yang sedang dijalani kelompok usia tertentu tersebut. Untuk melihat partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang mengenyam pendidikan formal sesuai dengan kelompok usianya tersebut digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). Secara ringkas, APM dijabarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$APM = \frac{\text{Jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan sekolah yang sesuai}} \times 100\%$$

Secara umum APM menurut kelompok usia sekolah di Kabupaten Ponorogo ditunjukkan pada gambar 3.5. Penduduk yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Dasar pada usia 7-12 tahun di Kabupaten Ponorogo tahun

2018 sebesar 99,45 atau lebih kecil dari APS pada kelompok usia 7-12 tahun. Sementara itu, penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada usia 13-15 tahun di tahun 2018 sebanyak 84,94 persen. APM jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Ponorogo tahun 2018 hanya sebesar 66,54, terendah dibandingkan APM jenjang pendidikan di bawahnya. APM jenjang pendidikan SMA sebesar 66,54 dapat diartikan penduduk Kabupaten Ponorogo tahun 2018 yang mengenyam bangku pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 66,54 persen.

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, 2018 (Persen)



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018

3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan

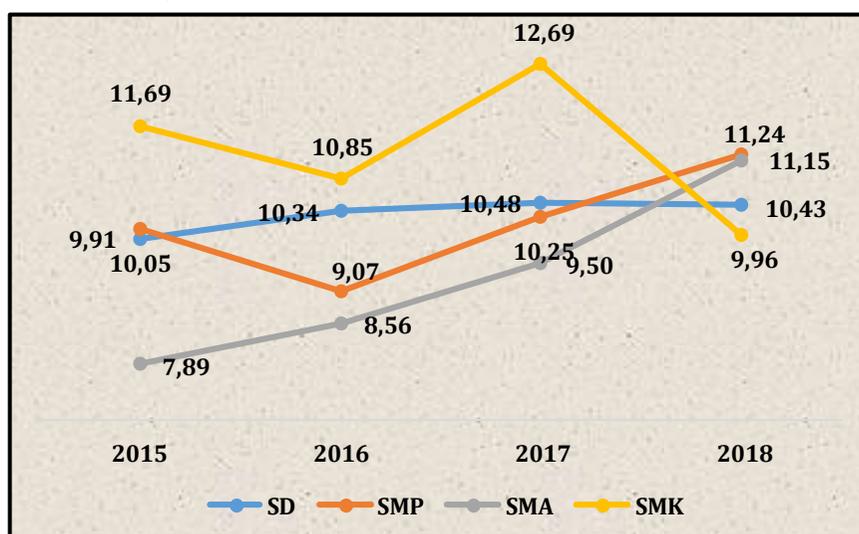
Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid-guru, rasio guru-sekolah dan rasio murid-kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan di atas.

Rasio murid-guru pada jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat di Kabupaten Ponorogo tahun 2018 mengalami peningkatan yang ditunjukkan angka rasio yang lebih besar pada tahun tersebut. Hal ini dapat diartikan pada tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo setiap satu guru tingkat SMP dan SMA sederajat mempunyai beban mengajar murid yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio murid-guru pada jenjang SD tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sedangkan rasio murid-guru pada jenjang SMK semakin kecil dari tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa jumlah murid yang harus dibimbing oleh satu guru lebih sedikit.

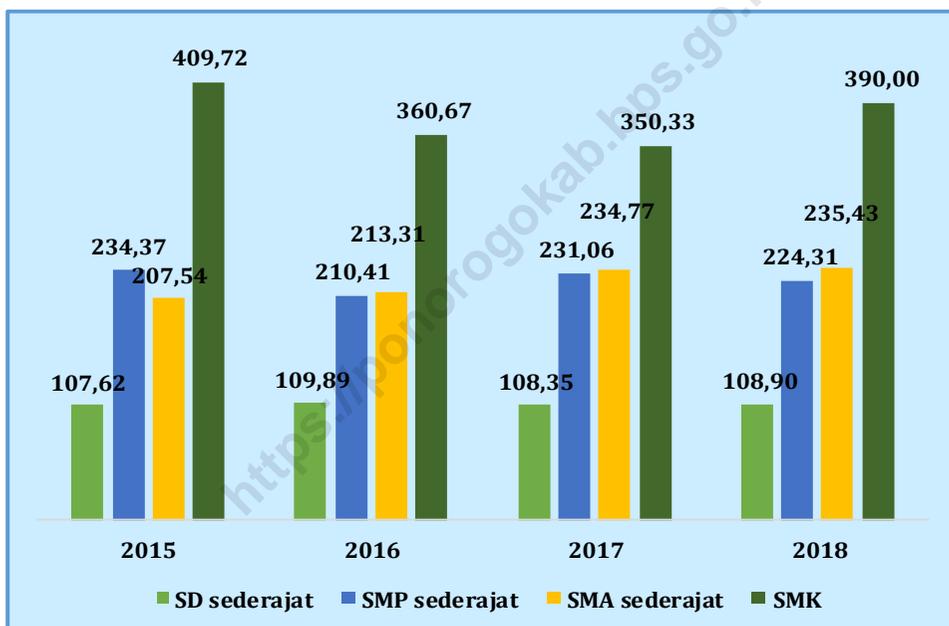
Gambar 3.6 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, 2015-2018



Sumber: Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 2015-2018, diolah

Rasio murid-guru diartikan sebagai banyaknya murid yang dibimbing oleh satu guru. Semakin kecil rasio murid-guru maka semakin sedikit murid yang dibimbing oleh guru, dengan demikian diharapkan transfer ilmu dari guru pada anak didiknya semakin baik dan kualitas pelayanan pendidikan semakin bagus. Dengan kata lain, pada tahun 2018 secara garis besar terjadi penurunan fasilitas sekolah yang memadai dengan rasio murid/guru yang meningkat kecuali untuk jenjang SMK.

Gambar 3.7. Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, 2015-2018



Sumber: Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 2015-2018, diolah

Selain rasio murid-guru, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan adalah rasio murid-sekolah. Rasio murid-sekolah menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung peserta didik. Rasio murid-sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Ponorogo cenderung menurun pada jenjang SD sederajat dan SMK. Pada tahun 2018 rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang SMK sebesar 390,00, dimana dapat diartikan satu sekolah untuk menampung 390 murid.

Peningkatkan kualitas pelayanan pendidikan tidak hanya didorong oleh penambahan jumlah guru dan unit sekolah (faktor input) saja, namun yang perlu menjadi perhatian adalah keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah sistem mengandung rangkaian kegiatan mulai dari input, proses, output serta faktor internal dan eksternal, dimana masing-masing komponen/kegiatan tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan utama sistem tersebut.

<https://ponorogokab.bps.go.id>



4

KETENAGAKERJAAN

<https://ponorogokab.bps.go.id>



4. KETENAGAKERJAAN

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat menjadi sasaran pembangunan ideal suatu daerah.

Disinilah letak isu pentingnya faktor ketenagakerjaan itu berperan dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian unggulan Kabupaten Ponorogo. Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambil kebijakan yang tepat sasaran.

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa indikator tenaga kerja yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) kondisi Agustus tahun 2013-2018. Namun indikator tenaga kerja tahun 2016 tidak dapat diulas karena sampel Sakernas di tahun tersebut tidak mencukupi untuk estimasi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Indikator yang akan dianalisis antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah, gaji/pendapatan bersih.

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Ponorogo, Agustus 2013 - 2018



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2013-2018
Keterangan : Data tahun 2016 tidak tersedia

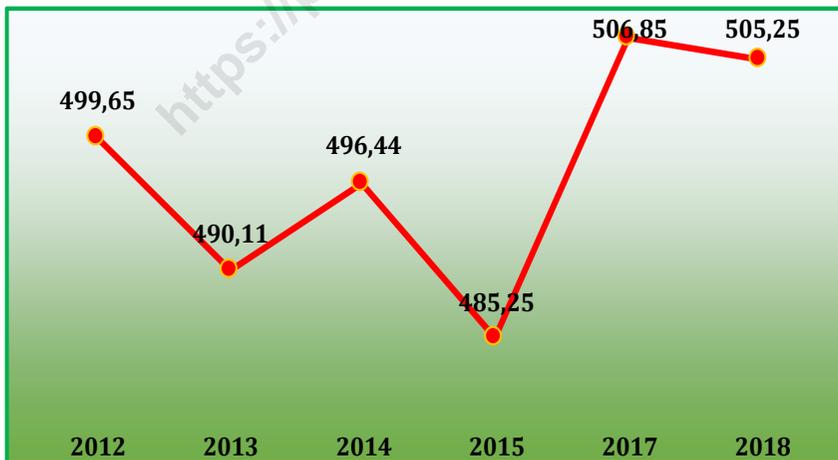
Tabel 4.1 Penduduk Kabupaten Ponorogo Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Agustus Tahun 2015 - 2018

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2015	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(5)
1. Angkatan Kerja (AK)	<i>orang</i>	485.245	506.848	505.250
Bekerja	<i>orang</i>	467.372	487.811	485.697
Pengangguran	<i>orang</i>	17.873	19.037	19.553
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,24	72,61	72,07
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,68	3,76	3,87

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2015-2018

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Gambar 4.2 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Ponorogo, 2012-2018 (Ribuan Orang)



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2012-2018

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo pada Agustus 2018 sebesar 505,25 ribu orang, lebih rendah sekitar 1,6 ribu orang dibanding Agustus 2017. Jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini menunjukkan perubahan cukup fluktuatif dengan kecenderungan naik, dampaknya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Ponorogo yang fluktuatif juga pada kurun waktu tersebut.

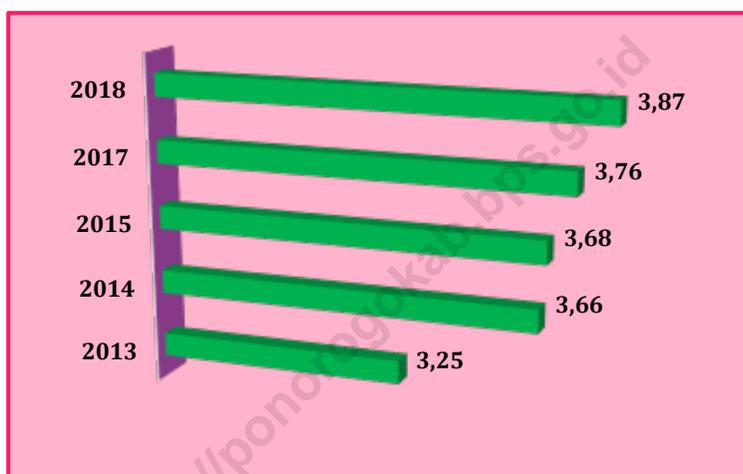
Naiknya jumlah angkatan kerja berdampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Ponorogo. Pada Agustus 2013, TPAK Kabupaten Ponorogo mencapai 71,81 persen. Pada Agustus 2014, meningkat mencapai angka 72,31 persen. Sedangkan Agustus 2015 sebesar 70,24 persen dan pada Agustus 2017 naik menjadi 72,61 persen. Namun pada Agustus 2018 sedikit menurun menjadi 72,07 persen. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 72,07 persen penduduk Kabupaten Ponorogo yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 27,93 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Banyak hal yang bisa diindikasikan sebagai pemicu bertambahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Ponorogo antara lain dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Kabupaten Ponorogo.

Peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorong program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Ponorogo, 2013-2018



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2013-2018

Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan pada penduduk laki-laki namun menurun pada penduduk perempuan. TPT penduduk laki-laki pada tahun 2018 meningkat sebesar 1,97 persen dibanding tahun 2017 dari 3,17 persen menjadi 5,15 persen. Sebaliknya pada penduduk perempuan TPT menurun 2,43 persen dari 4,56 persen di tahun 2017 menjadi 2,13 persen di tahun 2018. Secara keseluruhan TPT Kabupaten Ponorogo meningkat tipis sebesar 0,11 persen dari 3,76 persen di tahun 2017 menjadi 3,87 persen di tahun 2018.

Peningkatan TPT berarti jumlah penduduk yang menganggur semakin bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya TPT penduduk laki-laki yang cukup tajam, kini persentasenya menjadi

jauh lebih tinggi dibandingkan TPT pada penduduk perempuan. TPT Kabupaten Ponorogo tahun 2018 juga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT Jawa Timur yang mencapai 3,99 persen.

4.3. Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan

Mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan meningkatkan status pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan karena sebagian besar lulusan perguruan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Akibatnya sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, 2017-2018

Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/ belum pernah	-	0,20	-	0,26	-	0,23
Tidak/belum tamat SD	0,11	-	-	-	0,07	-
SD	0,25	0,70	0,35	-	0,29	0,40
SMP	0,37	2,00	0,84	0,75	0,57	1,47
SMA Umum	1,00	0,52	1,32	0,16	1,13	0,37
SMK	0,76	1,24	1,39	0,60	1,02	0,97
D I/II/III/IV	0,40	0,34	0,51	-	0,45	0,19
Universitas	0,28	0,14	0,15	0,36	0,22	0,24
Total	3,17	5,15	4,56	2,13	3,76	3,87
SMA +	2,43	2,25	3,37	1,12	2,83	1,77

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2017-2018

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, TPT penduduk tahun 2018 dengan pendidikan tamat SMA dan tamat SMK mengalami penurunan menjadi masing-masing sebesar 0,37 persen dan 0,97 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Secara keseluruhan TPT untuk jenjang pendidikan yang ditamatkan SMA ke atas mengalami penurunan di tahun 2018.

TPT penduduk yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 0,23 persen pada tahun 2018. TPT penduduk yang berpendidikan SD sebesar 0,40 persen. TPT tertinggi terjadi pada penduduk yang berpendidikan SMP baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Perlu dikaji lebih lanjut agar diperoleh solusi permasalahan TPT di Kabupaten Ponorogo yang didorong oleh tingginya angka TPT penduduk dengan jenjang pendidikan tamatan SMP. Salah satunya dengan meningkatkan jenjang pendidikan sampai minimal 9 tahun sehingga mempunyai daya saing kerja lebih tinggi.

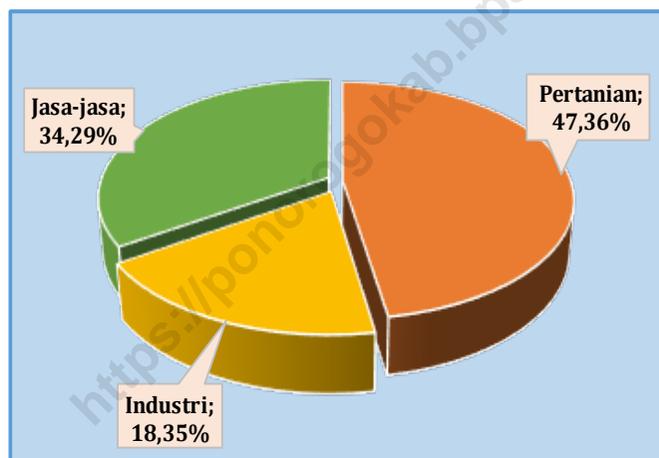
TPT untuk penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan Universitas mengalami peningkatan dari 0,22 persen pada tahun 2017 menjadi 0,24 persen di tahun 2018. Pada penduduk laki-laki, TPT lulusan Universitas mengalami penurunan persen dari 0,28 persen di tahun 2017 menjadi 0,14 persen di tahun 2018. TPT penduduk perempuan yang berpendidikan Universitas justru mengalami peningkatan dari 0,15 persen di tahun 2017 menjadi 0,36 persen di tahun 2018.

4.4. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan), Industri (pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta konstruksi) dan Jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2018, secara umum persentase penduduk yang bekerja pada sektor Industri mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dari 21,77 persen menjadi 18,35 persen. Peningkatan terjadi di sektor Pertanian sebesar 42,17 persen di tahun 2017 menjadi 47,36 persen di tahun 2018. Kondisi sebaliknya terjadi pada sektor Jasa. Penduduk yang bekerja di sektor ini secara umum menurun 1,77 persen dibandingkan dengan tahun 2017, turun dari 36,06 persen di tahun 2017 menjadi 34,29 persen di tahun 2018.

Gambar 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo, Agustus 2018

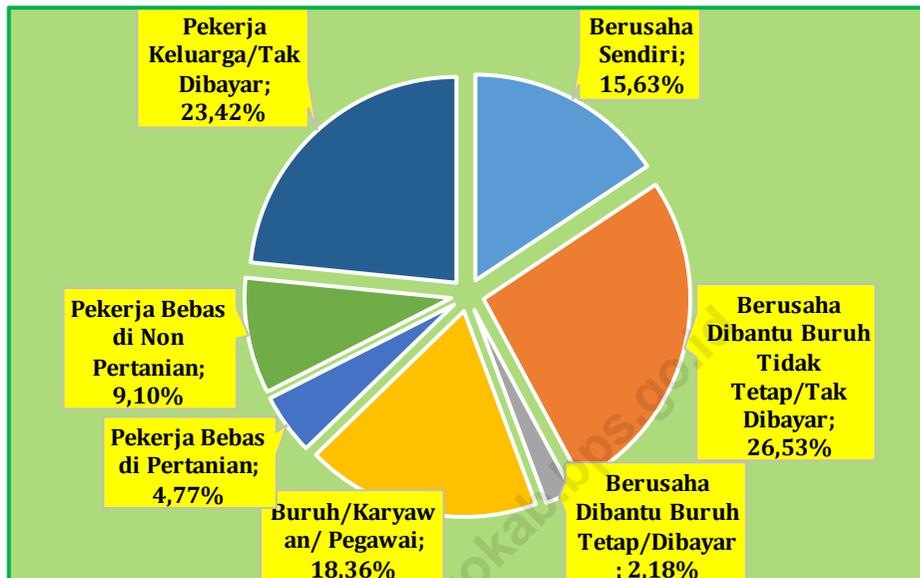


Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2018

Secara keseluruhan, sektor pertanian tetap menjadi lapangan usaha terbesar yang menyerap penduduk bekerja di tahun 2018. Komposisi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sektor Pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Meski terlihat kecenderungan terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan dari sektor Pertanian ke sektor Industri dan Jasa-jasa.

Pada tahun 2018 jumlah penduduk yang bekerja sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar masih lebih besar dibandingkan status

Gambar 4.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Status Usaha di Kabupaten Ponorogo, Agustus 2018



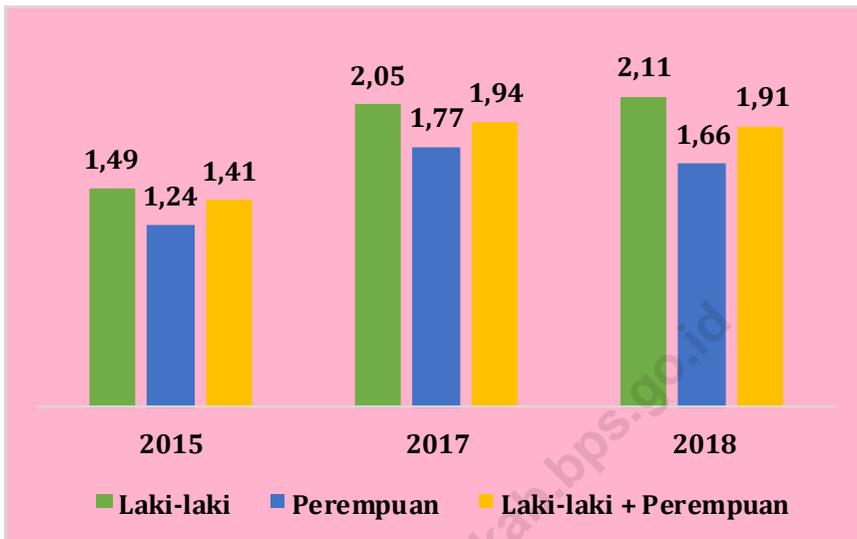
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2018

pekerjaan yang lain yaitu mencapai 26,53 persen. Penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar adalah yang terbesar berikutnya dengan persentase mencapai 23,42 persen. Persentase terbesar selanjutnya adalah penduduk yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 18,36 persen. Sebaliknya penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar menempati komposisi terkecil dengan persentase hanya 2,18 persen.

4.5. Upah/ Gaji/ Pendapatan Bersih

Balas jasa yang diberikan pada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan selama proses memproduksi barang atau jasa pada suatu perusahaan disebut dengan upah/gaji. Melalui ukuran upah/gaji yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya bisa dijadikan tolok ukur kehidupan dikatakan layak atau tidak.

Gambar 4.6 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo, 2015 - 2018 (Juta Rupiah)



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2015-2018

Dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih penduduk yang bekerja sebulan secara umum terjadi sedikit penurunan yaitu 1,23 persen pada tahun 2018 dengan besaran gaji bersih dari 1,94 juta rupiah sebulan pada tahun 2017 menjadi 1,91 juta rupiah sebulan pada tahun 2018. Meningkatnya persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan turunnya persentase penduduk yang bekerja di sektor industri dan jasa turut andil dalam penurunan rata-rata upah/gaji bersih penduduk tahun 2018. Biasanya rata-rata upah/gaji pekerja di sektor pertanian relatif lebih rendah dibandingkan sektor lainnya, sehingga peningkatan pekerja di sektor pertanian akan membawa pengaruh terhadap menurunnya rata-rata upah/gaji bersih penduduk secara keseluruhan.

Bila dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih selama sebulan berdasarkan jenis kelamin terjadi kenaikan untuk upah/gaji pekerja laki-laki, tetapi terjadi penurunan upah/gaji pekerja perempuan pada tahun 2018.

Untuk pekerja laki-laki rata-rata upah meningkat sebesar 2,89 persen dari 2,05 juta rupiah per bulan menjadi sebesar 2,11 juta rupiah per bulan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Sementara rata-rata upah/gaji untuk pekerja perempuan mengalami penurunan 6,26 persen yaitu dari 1,77 juta rupiah di tahun 2017 menjadi 1,66 juta rupiah per bulan di tahun 2018.

<https://ponorogokab.bps.go.id>



5

**TARAF DAN
POLA KONSUMSI**



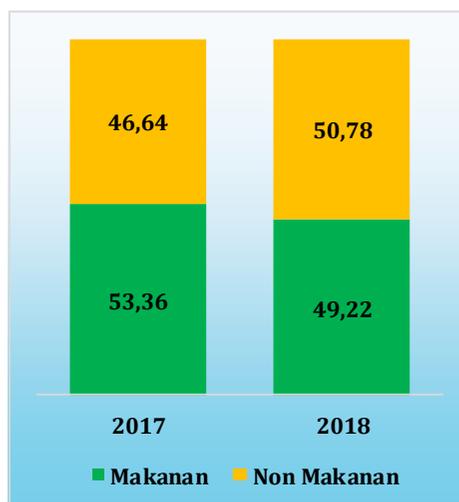
5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat menunjukkan suatu hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Hasrat untuk mengkonsumsi dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan ke dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan.

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Ponorogo, 2017-2018 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2017-2018

Struktur konsumsi masyarakat Kabupaten Ponorogo mulai mengalami perkembangan, sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

Tabel 5.1 Rata-rata pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Ponorogo, 2017 - 2018 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	388.689	403.727	53,36	49,22
Bukan Makanan	339.756	416.516	46,64	50,78
- Perumahan	147.499	175.521	20,25	21,40
- Barang dan Jasa	78.657	95.570	10,80	11,65
- Pakaian	16.049	20.248	2,20	2,47
- Barang Tahan lama	53.194	77.889	7,30	9,50
- Lainnya	44.357	47.289	6,09	5,77
Jumlah	728.445	820.243	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2017-2018

Gambaran konsumsi masyarakat di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel 5.1, selama 2017-2018 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk naik dari 728.445 rupiah menjadi 820.243 rupiah. Dimana pada tahun 2017 sekitar 388.689 rupiah atau 53,36 persen dikeluarkan untuk

konsumsi makanan, sedangkan 339.756 rupiah atau 46,64 persen dikeluarkan untuk konsumsi bukan makanan. Pada Tahun 2018 sekitar 403.727 rupiah atau 49,22 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan dan 416.516 rupiah atau 50,78 persen untuk konsumsi bukan makanan.

Dilihat dari persentase tersebut pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan sedangkan untuk pengeluaran bukan makanan mengalami kenaikan. Peningkatan persentase pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada semua jenis pengeluaran, kecuali pengeluaran untuk barang lainnya yang turun dari 6,09 persen pada tahun 2017 menjadi 5,77 persen pada tahun 2018. Konsumsi lainnya tersebut antara lain adalah pengeluaran untuk pajak dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara.

<https://ponorogokab.bps.go.id>



**PERUMAHAN
DAN
LINGKUNGAN**

<https://pplungokab.bps.go.id>



6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan

sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018, ada sekitar 92,58 persen tempat tinggal dengan lantai terluas bukan tanah. Sebesar 96,24 persen dengan jenis atap genteng, dan yang mempunyai dinding terluas adalah tembok sebesar 95,33 persen.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Ponorogo, 2017-2018 (Persen)

Indikator Kualitas Perumahan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Lantai terluas bukan tanah (%)	88,26	92,58
Jenis atap genteng (%)	97,88	96,24
Dinding terluas tembok (%)	93,90	95,33

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2018

Dilihat perkembangan dari tahun 2017, penguasaan tempat tinggal dengan lantai terluas bukan tanah naik sebesar 4,32 persen. Untuk tempat tinggal dengan jenis dinding terluasnya adalah tembok naik sebesar 1,43 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tempat

tinggal yang ditempati rumah tangga tahun 2018 semakin meningkat. Namun untuk tempat tinggal berjenis atap terluas adalah genteng mengalami penurunan sebesar 1,64 persen.

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah air, sehingga ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan dikonsumsi dan sanitasi merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Ponorogo, 2017-2018

Indikator Fasilitas Perumahan (1)	Perkotaan+Perdesaan	
	2017 (2)	2018 (3)
Air kemasan, air isi ulang & ledeng	24,03	26,62
Air minum bersih	94,55	93,36
Jamban sendiri dengan tangki septik	81,11	87,18
Jarak tempat penampungan kotoran/tinja ke sumber air minum > 10 m	68,73	80,93
Sumber penerangan listrik	99,76	99,77

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018

Pada tahun 2018, rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang menggunakan air minum bersih telah mencapai 93,36 persen. Sementara rumah tangga yang mengkonsumsi air minum dari air kemasan, air isi ulang, atau air ledeng sebesar 26,62 persen.

Fasilitas perumahan yang cukup penting peranannya dalam usaha sanitasi adalah penyediaan sarana jamban. Jika dilihat dari segi kesehatan

lingkungan dan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2018, rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik sudah mencapai 87,18 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 81,11 persen. Selain itu jarak tempat penampungan kotoran/tinja yang memadai dan jauh dari sumber air minum akan menghindarkan dari penyebaran penyakit. Jarak tempat penampungan kotoran/tinja ke sumber air minum yang lebih dari 10 meter sebesar 80,93 persen.

Selain itu sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik tahun 2018 sebanyak 99,77 persen.

6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa apalagi yang bebas sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan perumahan. Fakta yang terjadi, lahan untuk

perumahan semakin terbatas dan biaya untuk mendapatkan/membeli rumah yang layak sering tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan banyak rumah tangga yang menempati rumah yang kurang layak huni.

Tabel 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Ponorogo, 2017-2018 (Persen)

Indikator Fasilitas Perumahan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	92,77	94,43
Kontrak/sewa	1,56	0,81
Bebas Sewa	5,67	4,75
Rumah Dinas	-	-
Lainnya	-	-

Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2018

Rumah tangga di Kabupaten Ponorogo berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 yang menempati rumah milik sendiri sebesar 94,43 persen dan sisanya sebesar 5,56 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa sebesar 0,81 persen, dan bebas sewa sebesar 4,75 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang sebesar 92,77 persen. Penurunan terjadi pada status kepemilikan kontrak/sewa dan bebas sewa yang masing-masing turun sebesar 0,75 persen dan 0,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



7

KEMISKINAN

<https://publinfo.gokab.bps.go.id>



7. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai *the last, the least, the lowest, and the loss*. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa orde baru pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, masa kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) juga menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas, nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo

Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertuang dalam misinya, *Ponorogo Berbenah Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius*, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Pemerintah terus meningkatkan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin melalui kemudahan akses modal.

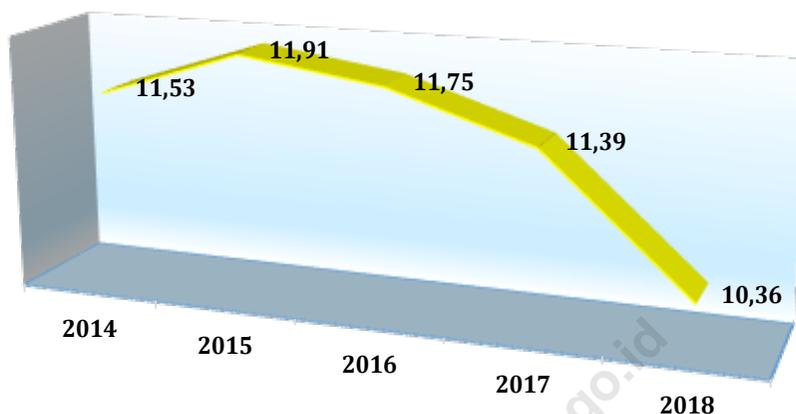
Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo, 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(5)
2014	99,86	11,53
2015	103,22	11,91
2016	102,06	11,75
2017	99,03	11,39
2018	90,22	10,36

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014-2018

Selama tahun 2014-2018, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo cukup fluktuatif meskipun dalam tiga tahun terakhir persentase penduduk miskin terus menurun. Pada tahun 2014 penduduk miskin Kabupaten Ponorogo sebesar 11,53 persen, kemudian naik menjadi 11,91 persen tahun 2015. Angka kemiskinan turun pada tahun 2016 sehingga penduduk miskin Kabupaten Ponorogo mencapai 11,75 persen, kemudian tahun 2017 dan 2018 tetap menurun menjadi masing-masing 11,39 persen dan 10,36 persen.

Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo, 2014-2018 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014-2018

7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan antar waktu selama 2014-2018. Pada tahun 2014 garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo sebesar Rp. 247.368 per kapita per bulan dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 297.467 per kapita per bulan pada tahun 2018.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P_1 , dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P_2).

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) mencapai 1,54 pada tahun 2014 kemudian naik 0,09 poin menjadi 1,63 pada tahun 2015. Namun P_1 kembali menurun pada periode 2016 menjadi 1,47, dan pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 1,41. Penurunan P_1 ini menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Ponorogo terhadap garis kemiskinan semakin rendah. Pada tahun 2018 P_1 kembali menunjukkan penurunan hingga menjadi 1,30. Hal ini mencerminkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2018 kembali mendekati garis kemiskinan, atau tingkat kedalamannya berkurang dibandingkan tahun 2017.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Kabupaten Ponorogo, 2014-2018

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	247.368	1,54	0,30
2015	251.525	1,63	0,33
2016	266.312	1,47	0,28
2017	279.168	1,41	0,27
2018	297.467	1,30	0,26

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014-2018

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) Kabupaten Ponorogo memiliki pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan (P_1) antar waktu. Pada tahun 2014 P_2 Kabupaten Ponorogo sebesar 0,30. Pada tahun 2015 P_2 meningkat menjadi 0,33. Sedangkan pada tahun 2016 P_2 kembali menurun menjadi 0,28 dan terus menurun pada tahun 2017 menjadi 0,27. pada tahun 2018 indeks keparahan kemiskinan kembali menurun hingga mencapai angka 0,26. Nilai P_2 yang cenderung meningkat menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin lebar. Sebaliknya nilai P_2

yang cenderung menurun menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.

Dari informasi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin semakin berkurang karena tingkat pengeluaran penduduk semakin tinggi, ketimpangan pengeluaran juga semakin sempit hingga pengeluaran penduduk sudah banyak yang diatas garis kemiskinan. Tingkat pengeluaran penduduk yang semakin tinggi bisa dikatakan berbanding lurus dengan pendapatan yang semakin tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

<https://ponorogokab.bps.go.id>

A decorative graphic featuring a white number '8' centered within a brown, multi-pointed starburst shape. This starburst is superimposed on a dark brown ribbon that has a 3D effect, appearing to wrap around the starburst.

8

SOSIAL LAINNYA

<https://ppliprogokab.bps.go.id>



8. SOSIAL LAINNYA

8.1 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Akses terhadap teknologi informasi pada masa kini sudah semakin mudah dan cepat. Dengan teknologi informasi yang semakin canggih, seseorang dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitasnya baik dalam berkomunikasi, berkerja, berbisnis dan memperoleh berbagai informasi yang mungkin dahulu sulit untuk didapatkan. Sehingga penguasaan/kepemilikan dan akses terhadap teknologi informasi dapat menunjukkan seberapa jauh perkembangan kesejahteraan rakyat.

Di abad milenial ini, kemajuan teknologi informasi berkembang cepat. Era penggunaan telepon sudah bergeser ke *handphone* (HP). Bagi masyarakat sekarang, HP lebih praktis dan ekonomis dibanding telepon. Memiliki HP tidak memerlukan biaya pemasangan dan tidak tergantung adanya sarana kabel telepon. Cukup dengan tower signal, penggunaan HP bisa dilakukan dimana saja.

Di samping itu, pembelian pulsa HP bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Bahkan hanya dengan perangkat HP, siapapun bisa melakukan akses internet dengan tujuan yang lebih luas.

Kepopuleran HP dibandingkan telepon bisa ditunjukkan dari hasil data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018. Dari data Susenas diperoleh jumlah rumah tangga yang mempunyai telepon di rumah pada tahun 2018 tercatat hanya 0,73 persen. Persentase ini berkurang 0,66 persen dibandingkan tahun 2017. Kondisi ini berbeda jauh dengan jumlah rumah tangga yang anggota rumah tangganya menguasai/memiliki HP yang mencapai 88,90 persen. Persentase ini jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang penguasaan/kepemilikan HP sebesar 56,28 persen (naik 32, 62 persen).

Rumah Tangga yang menggunakan HP merasa cukup terbantu dibanding yang menggunakan telepon. Berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan komunikasi seluler, menjadikan HP sebagai alat komunikasi yang paling diminati di kalangan masyarakat. Dengan memanfaatkan aplikasi HP, rumah tangga bisa melakukan komunikasi lewat Facebook, Whatshapp, Line dan lain sebagainya yang semuanya tidak bisa dinikmati pengguna telepon biasa.

Kelebihan lainnya, untuk daerah-daerah terpencil yang tidak mempunyai jaringan telepon, rumah tangga bisa melakukan komunikasi melalui HP berkat adanya *tower signal* di daerah tersebut.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangganya Menguasai/Memiliki atau Menggunakan Alat Komunikasi dan Informasi dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Ponorogo, 2018 (Persen)



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

Sementara rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang menggunakan alat informasi berupa komputer atau laptop dalam tiga bulan terakhir tercatat sebesar 31,73 persen, meningkat sekitar dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar 16,85 persen. Persentase ini diduga akan semakin meningkat

dari tahun ke tahun seiring semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan dan informasi.

Beberapa rumah tangga memanfaatkan komputer dan laptop sebagai sarana penunjang pendidikan dan mengembangkan bisnis (hasil usaha). Berbagai produk usaha dapat dipasarkan dengan menggunakan komputer dan laptop yang terhubung jaringan internet memunculkan pasar online. Pendek kata, penggunaan alat komunikasi dan informasi semakin diperlukan dan berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Ponorogo.

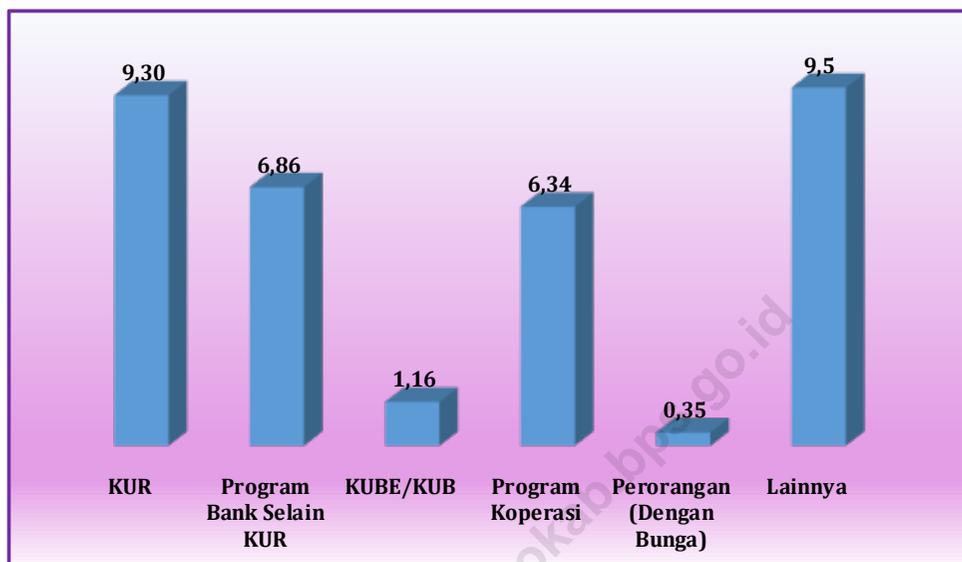
Dengan berbagai kepemilikan rumah tangga akan alat komunikasi dan informasi, semakin mudah pula rumah tangga dalam akses internet guna memperoleh berbagai informasi. Pada tahun 2018, terdapat 69,84 rumah tangga yang anggota rumah tangganya mengakses internet. Persentase ini sangat jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 33,19 persen.

8.2 Kredit Usaha

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari pemerintah dan swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah.

Terkait Kredit Usaha Rakyat, tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Sosialisasi KUR terhadap masyarakat umum juga masih dirasakan minim. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak. Akibatnya, di antaranya terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Selain itu usaha juga akan sulit berkembang karena kesempatan masyarakat untuk memperoleh modal dengan mudah dan murah terbatas oleh pengetahuannya tentang kredit usaha.

Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga Yang Anggota Rumah Tangganya Menerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Ponorogo, 2018 (Persen)



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

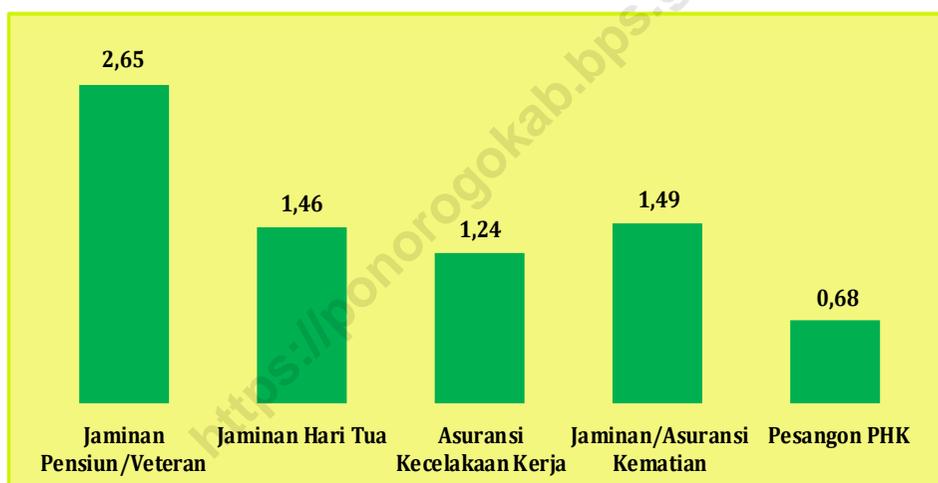
Dari semua rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang anggota rumah tangganya ada yang menerima kredit usaha pada tahun 2018, dapat diambil persentase masing-masing jenis kredit usaha yang diambil. Persentase terbanyak adalah dari kredit Lainnya diluar KUR, Program Bank Selain KUR, KUBE/KUB, Program Koperasi maupun Perorangan (Dengan Bunga) sebesar 9,50 persen, diikuti KUR sebesar 9,30 persen. Selanjutnya adalah Program Bank Selain KUR sebesar 6,86 persen dan Program Koperasi sebesar 6,34 persen.

Dua jenis kredit usaha yang juga digunakan penerima kredit usaha adalah KUBE/KUB dan Perorangan (Dengan Bunga) masing-masing 1,16 persen dan 0,35 persen. Bagi wilayah yang tidak tersedia lembaga pembiayaan, meminjam uang kepada individu atau seseorang untuk usaha menjadi hal yang sudah biasa. Padahal resiko meminjam kepada individu atau perseorangan cukup beresiko karena kebanyakan berbunga tinggi.

8.3 Jaminan Sosial dan Pembiayaan/Asuransi

Selain adanya program kredit usaha, program kesejahteraan rakyat di Kabupaten Ponorogo juga melalui pemberian jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO no. 102 tahun 1952.

Gambar 8.3 Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangganya Memiliki/Menerima Jaminan Sosial serta Pembiayaan/Asuransi dalam Setahun Terakhir di Kabupaten Ponorogo, 2018 (Persen)



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

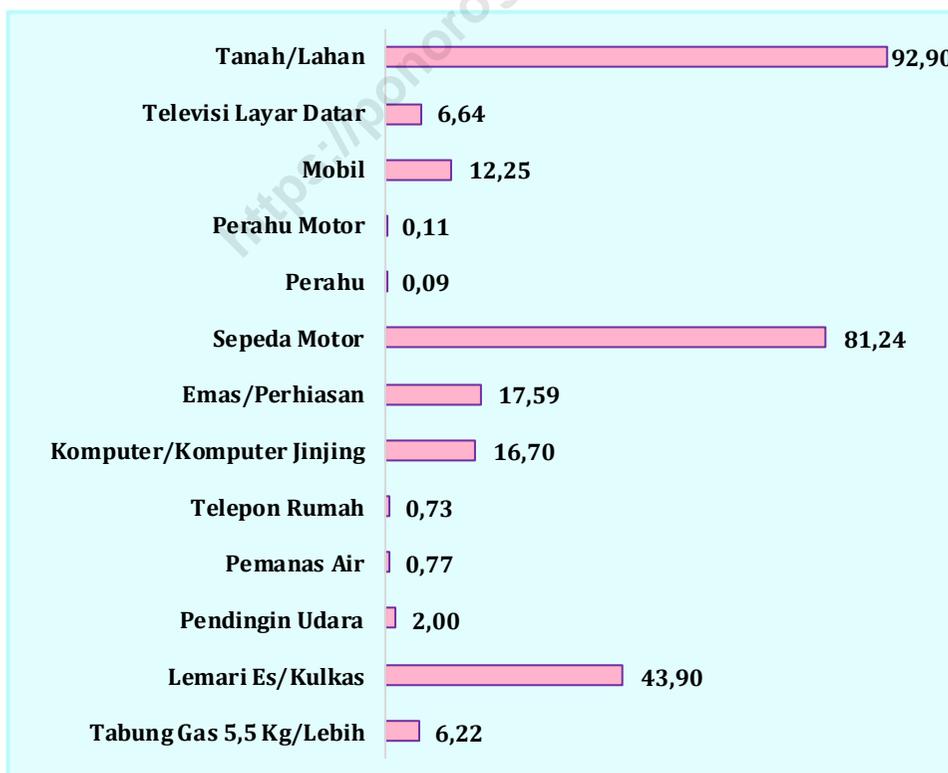
Berbagai jenis jaminan sosial atau pembiayaan/asuransi meliputi jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon PHK. Dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang anggota rumah tangganya ada yang memiliki/menerima jaminan pension/veteran dalam setahun terakhir tahun 2018 sebanyak 2,65 persen dan merupakan jenis kepemilikan jaminan sosial yang terbanyak. Terbanyak kedua adalah jaminan/asuransi kematian sebesar 1,49 persen. Lainnya adalah jaminan hari tua sebesar 1,46 persen, asuransi kecelakaan kerja sebesar 1,24 persen, dan pesangon PHK sebesar 0,68 persen.

Sementara persentase rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahun 2018 di Kabupaten Ponorogo mencapai 17,45 persen.

8.4 Kepemilikan Aset

Kepemilikan aset dapat menjadi salah satu acuan umum dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai bentuk aset seperti tanah dan perhiasan dapat menjadi pilihan masyarakat sebagai bentuk simpanan selain tabungan. Masyarakat dengan pendapatan tinggi juga cenderung memiliki fasilitas lengkap dalam tempat tinggalnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti kepemilikan kendaraan, televisi, komputer, pendingin udara, lemari es dan lain sebagainya.

Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset di Kabupaten Ponorogo, 2018 (Persen)



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018

Dilihat dari jenis kepemilikan aset yang dimiliki rumah tangga pada tahun 2018, terbanyak adalah kepemilikan tanah/lahan yaitu sebesar 92,90 persen. Sedangkan aset kedua terbanyak yang dimiliki adalah sepeda motor sebesar 81,24 persen. Aset ketiga terbanyak yang dimiliki adalah lemari es/kulkas sebesar 43,90 persen. Ketiga aset tersebut mempunyai peran yang sangat besar untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga semua kalangan masyarakat baik yang berpendapatan rendah hingga berpendapatan tinggi membutuhkannya. Tanah/lahan berkaitan dengan rumah tempat tinggal mereka. Selain dimanfaatkan untuk area membangun tempat tinggal, tanah juga memiliki nilai yang semakin lama semakin tinggi. Sepeda motor digunakan untuk akses menuju ke berbagai tempat dimana masyarakat beraktivitas dalam kesehariannya dengan mudah. Dengan harga yang cukup terjangkau semua kalangan dapat lebih mudah memilikinya. Lemari es/kulkas berfungsi untuk menyimpan berbagai bahan makanan untuk konsumsi sehari-hari sehingga lebih tahan lama. Dengan begitu rumah tangga dapat lebih menghemat pengeluarannya.



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://ponorogokab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PONOROGO

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 14 Ponorogo

Telp/Fax : (0352) 481026 E-mail : bps3502@bps.go.id

Homepage : <http://ponorogokab.bps.go.id>